

**FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN KESESUAIAN
KOMPENSASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KAB/KOTA DI KALIMANTAN SELATAN)**

Kharisma Nugraha Putra, Iwan Triyuwono, Lilik Purwanti
Universitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono No. 165 Malang, 65145
Kharismanugraha7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa yang dimoderasi oleh kesesuaian kompensasi. Sampel dalam penelitian ini adalah kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) pada tiap pemerintah kab/kota di Kalimantan Selatan. Metode pengumpulan data adalah survei menggunakan kuisisioner sebagai instrumen penelitian. Jumlah sampel sebanyak 316. Data dianalisis menggunakan *Structural Equation Modelling-Partial least square* (SEM-PLS) dengan program WarpPLS 6.0. Hasil penelitian menemukan kesesuaian kompensasi memoderasi pengaruh sikap kearah perilaku dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, kesesuaian kompensasi tidak signifikan memoderasi pengaruh norma subyektif terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Kata Kunci : *fraud* Pengadaan Barang dan Jasa, teori perilaku terencana, kesesuaian kompensasi.

Abstract

This research to examine the effect of attitude toward behavior, subjective norm, and perceived behavioral control on the of the state civil apparatus to commit fraudulent procurement of goods and services moderated by compensation suitability. The sample in this study are working group of procurement services units at each city/regency government in south borneo. The method of data collection is survey using questionnaire as instrument of the research. The ammount of the sample was 316. The data was analysed using Structural Equation Modelling-Partial least square (SEM-PLS) with WarpPLS 6.0. The result of research finds compensation suitability moderates the effect of attitude toward behavior and perceived behavioral control on the intentions of the state civil apparatus to commit fraudulent procurement of goods and services. However compensation suitability insignificantly moderates the effect of subjective norm on the intentions of the state civil apparatus to commit fraudulent procurement of goods and services.

Key words : fraudulent procurement of goods and services, theory of planned behavior, compensation suitability.

I. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa memiliki peran yang sangat penting bagi suatu pemerintah. Listyanto (2012) menjelaskan pengadaan barang dan jasa

berperan sebagai alat penggerak roda perekonomian nasional dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat. Pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa dapat memberikan pelayanan

ke publik dengan cara meningkatkan pelayanan (Harziani, 2015). Oleh sebab itu, dalam proses pengadaan barang dan jasa memiliki tuntutan untuk dilaksanakan dengan tata kelola yang baik (Sopian, 2012).

Tata kelola yang baik tentunya tak terlepas dari kerjasama seluruh pihak. Namun, fakta yang terjadi adalah mulai terungkapnya kasus-kasus pada pengadaan barang dan jasa. Kasus pengadaan barang dan jasa yang terungkap salahsatunya yaitu kasus suap terkait proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai Kalimantan Selatan, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 3,6 miliar (Republika.co.id, 2018).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 84 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp. 1,02 Triliun (Detik.com, 2018). Tuanakotta (2010:431) menjelaskan bahwa sumber korupsi terbesar di Indonesia dalam organisasi sektor publik adalah kegiatan pengadaan, selain itu juga menjadi salah satu sumber utama kebocoran negara. Maraknya kasus korupsi terkait

pengadaan barang dan jasa tersebut menandakan adanya perihal yang tidak beres dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kasus korupsi yang marak terjadi biasanya dikenal dengan istilah "*fraud*". *Fraud* adalah penipuan yang sengaja dilakukan baik perorangan maupun sekelompok pihak yang tidak diketahui oleh pihak yang dirugikan namun memberikan keuntungan bagi pelakunya (Bologna *et al.*, 1993). *Fraud* pengadaan barang dan jasa pada dasarnya tidak terlepas dari perilaku aparatur sipil negara yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa namun memiliki perilaku untuk mementingkan kepentingan pribadi. Sangat menarik untuk diteliti terkait perilaku aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian yang menyoroti perilaku dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan *fraud* sebelumnya sudah pernah dilakukan seperti Carpenter dan Reimers (2005), Lin dan Chen (2010), dan Respati (2011). Beberapa peneltian sebelumnya menggunakan teori perilaku terencana

Ajzen (1991) sebagai kerangka teoritis dalam menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang melakukan *fraud*. Berdasarkan teori perilaku terencana faktor penentu seseorang melakukan perilaku adalah niat perilaku, secara konseptual ada tiga faktor yang mempengaruhi niat perilaku yaitu sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian (Ajzen, 1991).

Hasil penelitian Carpenter dan Reimers (2005) menunjukkan bukti bahwa sikap kearah perilaku berpengaruh positif terhadap niat seseorang melakukan *fraud*. Hasil penelitian ini juga didukung oleh temuan Lin dan Chen (2010) dan Respati (2011) yang menunjukkan adanya pengaruh yang positif sikap kearah perilaku terhadap niat seseorang melakukan *fraud*. Faktor lain yang mempengaruhi niat melakukan *fraud* adalah norma subyektif. Hasil penelitian Carpenter dan Reimers (2005), Lin dan Chen (2010), dan Respati (2011) menunjukkan adanya pengaruh positif norma subyektif terhadap niat seseorang melakukan *fraud*.

Faktor ketiga dalam teori perilaku terencana adalah kontrol perilaku persepsian. Hasil penelitian Carpenter

dan Reimers (2005) dan Respati (2011) belum mendukung teori perilaku terencana yang menyatakan adanya pengaruh positif kontrol perilaku persepsian terhadap niat perilaku. Hasil penelitian Carpenter dan Reimers (2005) dan Respati (2011) menunjukkan kontrol perilaku persepsian tidak signifikan mempengaruhi niat seseorang melakukan *fraud*. Namun demikian, hasil penelitian Lin dan Chen (2010) menemukan adanya pengaruh positif kontrol perilaku persepsian terhadap niat seseorang melakukan *fraud*. Ketidakkonsistenan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini diperlukan penelitian lebih lanjut.

Dasar pemikiran penelitian ini adalah dari beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis teori perilaku terencana Ajzen (1991) yang mengangkat permasalahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan menyoroti perilaku aparatur sipil negara yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Carpenter dan Reimers (2005). Namun demikian, penelitian ini memiliki

perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menambahkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa dalam kerangka teoritis teori perilaku terencana.

Penambahan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran Ajzen (1991) berpendapat bahwa ada faktor dari luar yang secara tidak langsung yang akan mempengaruhi sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat perilaku. Variabel-variabel itu disebut dengan variabel eksternal yaitu meliputi variabel demografi, karakteristik personalitas, kepercayaan dan sikap mengenai obyek-obyek, karakteristik tugas, dan faktor situasional yang akan mempengaruhi perilaku secara tidak langsung (Jogiyanto, 2007). Hal ini juga didukung oleh Trevino (1986) dalam model pengembangan interaksionis menjelaskan bahwa adanya perpaduan dari hasil individual dan situasional dalam situasi praktis perilaku etis atau tidak etis. Beberapa literatur mengenai pengembangan moral dan pendekatan dalam memahami perilaku pengambilan etis juga mengakui bahwa karakteristik

individu saja tidak cukup untuk menjelaskan secara utuh terkait moral dan perilaku etis (Victor dan Cullen, 1988).

Berdasarkan pemikiran Ajzen (1991) dan model pengembangan interaksionis Trevino (1986), penelitian ini menambahkan faktor situasional sebagai variabel moderasi dalam model teori perilaku terencana untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan *fraud*. Terkait faktor situasional dalam situasi praktis perilaku etis atau tidak etis, kesesuaian kompensasi adalah faktor situasional yang akan mempengaruhi seseorang dalam berperilaku etis atau tidak etis (Agustina, 2014). Kesesuaian kompensasi diduga mempengaruhi hubungan sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Kesesuaian kompensasi adalah kompensasi yang diberikan suatu organisasi (baik dalam bentuk ekstrinsik dan intrinsik) sesuai ataupun layak dengan hasil dari pekerjaan yang dilakukan (Gibson, 1997). Kompensasi (*reward*) sangat penting bagi perilaku karyawan maupun manajemen (Luthans, 1998). Kesesuaian

kompensasi sangat penting bagi pegawai dalam menentukan tingkat kesejahteraan pegawai (Thioyyibatun,2009). Kompensasi yang sesuai akan membuat seseorang cenderung terlibat dalam perilaku etis. Sebaliknya, Kompensasi yang tidak sesuai cenderung terlibat dalam perilaku tidak etis (Agustina, 2014). Oleh karena itu, diduga kesesuaian kompensasi memoderasi pengaruh sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Penelitian ini dilaksanakan pada 13 pemerintahan kab/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil sorotan KPK yang menyoroti beberapa lingkup salahsatunya adalah pengadaan barang dan jasa, menjelaskan bahwa tata kelola Provinsi Kalimantan Selatan masih serampangan (Tempo.co, 2017). Hal ini lah yang mendasari lokasi penelitian dipilih, tata kelola pemerintahan serampangan cenderung akan menyebabkan munculnya niat aparatur sipil negara untuk melaksanakan perilaku *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah apakah kesesuaian kompensasi memoderasi pengaruh sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa?. Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk membuktikan secara empiris kesesuaian kompensasi sebagai variabel moderasi pengaruh sikap kearah perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang di peroleh dari pendapat PokjaULP yang tersebar pada pemerintahan kab/kota di Kalimantan Selatan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survei dengan menggunakan kuisisioner sebagai instrumen penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur sipil negara yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa, populasi dalam penelitian ini yaitu kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (PokjaULP) pada tiap pemerintahan

kab/kota di Kalimantan Selatan. Metode *sampling* sensus digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Alasan peneliti menggunakan teknik *sampling* jenuh adalah agar membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modelling-Partial least square* (SEM-PLS) dengan bantuan program WarpPLS 6.0. Analisis SEM-PLS terdiri dari dua tahap evaluasi yaitu *outer* model dan *inner* model. Tahap pertama yaitu evaluasi *outer model*, dilakukan untuk melihat validitas dan reliabilitas data. Uji validitas dalam *outer model* dilakukan dengan menguji validitas konvergen dan validitas diskriminan. Tahap kedua yaitu evaluasi *inner* model dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian.

II. PEMBAHASAN.

A. Tinjauan Pustaka

Teori Perilaku Terencana

Artikel yang berjudul "*From Intention to Action : a Theory of Planned Behavior*" adalah artikel yang diperkenalkan oleh Icek Azen untuk menjelaskan teori perilaku terencana. Ajzen (1991) menjelaskan teori yang dibuat untuk memprediksi

maupun menjelaskan perilaku dalam konteks yang spesifik yaitu teori perilaku terencana. Kegunaan teori perilaku terencana mampu memprediksi cakupan perilaku yang luas (Chang, 1998). Teori perilaku terencana adalah teori yang mampu memprediksi perilaku pada konteks etika bisnis (Carpenter dan Reimers, 2005). Teori perilaku terencana sudah banyak digunakan sebagai teori dalam memprediksi cakupan luas perilaku dan paling berpengaruh untuk menjelaskan maupun memprediksi perilaku (Pavlou dan Fygenson, 2006).

Teori perilaku terencana menjelaskan faktor utama penentu seseorang untuk melakukan perilaku adalah niat perilaku, secara konseptual niat perilaku dibentuk oleh sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian (Ajzen, 1991). Secara umum teori menyatakan jika sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian semakin tinggi terkait dengan perilaku, maka akan semakin kuat niat seseorang untuk melaksanakan perilaku (Ajzen, 1991).

1. Sikap kearah perilaku

Sikap kearah perilaku merupakan penilaian yang dimiliki seseorang untuk melakukan perilaku baik mendukung maupun tidak mendukung perilaku tersebut (Ajzen,1991). Robbins dan Marry (2007) menjelaskan sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif mengenai objek, orang atau peristiwa yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Sikap mampu dalam memprediksi niat perilaku dan perilaku (Ajzen, 2001). Dalam penelitian ini, sikap kearah perilaku yang dimaksud adalah sikap aparatur sipil negara mengenai pandangannya terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa. Sikap kearah perilaku diukur dengan mengadopsi instrumen dalam penelitian Carpenter dan Reimers (2005). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sikap kearah perilaku dalam penelitian ini adalah baik, bijaksana, dan menguntungkan.

2. Norma subyektif

Norma subyektif adalah keyakinan normatif yang dimiliki seseorang serta motivasi untuk melaksanakan suatu perilaku yang diperoleh dari pihak-pihak tertentu (Ajzen, 1991). Norma subyektif adalah persepsi yang dimiliki oleh

seseorang bahwa orang yang penting baginya berpikir seharusnya atau tidak seharusnya melakukan perilaku yang dipertimbangkan (Fisbein dan Ajzen, 1975). Norma subyektif adalah pandangan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan kepercayaan orang disekitar sehingga mempengaruhi niat berperilaku (Jogiyanto, 2007:42). Dalam penelitian ini, norma subyektif yang dimaksud adalah persepsi aparatur sipil negara terhadap pandangan orang lain terkait dengan *fraud* pengadaan barang dan jasa yang akan mempengaruhi aparatur sipil negara untuk melakukan atau tidak melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Norma subyektif diukur dengan mengadopsi instrumen penelitian Carpenter dan Reimers (2005) dan Respati (2011). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur norma subyektif adalah dukungan rekan sejawat, pimpinan, dan bawahan.

3. Kontrol perilaku persepsian

Kontrol perilaku persepsian adalah persepsi yang dirasakan berkenaan dengan mudah atau sulit

dalam melaksanakan suatu perilaku dan kendali yang diciptakan dari pengalaman sebelumnya dan halangan serta rintangan yang telah diantisipasi (Ajzen, 1991). Ajzen (2002) menekankan bahwa kontrol perilaku persepsian berhubungan dengan tingkat kontrol atas kinerja perilaku dan bukan merupakan kemungkinan yang dirasakan dalam melakukan perilaku yang akan memberikan hasil tertentu. Dalam penelitian ini, kontrol perilaku persepsian yang dimaksud adalah persepsi mudah atau sulit yang mengindikasikan ada atau tidaknya sumber kesempatan, dan juga halangan atau rintangan seorang aparatur sipil negara untuk melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Kontrol perilaku persepsian diukur dengan mengadopsi instrumen penelitian Carpenter dan Reimers (2005). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kontrol perilaku persepsian adalah merasa mempunyai kontrol penuh, mudah melakukan, jika menginginkan maka dengan mudah melakukan.

4. Niat *Fraud* Pengadaan Barnag dan jasa

Niat perilaku didefinisikan sebagai pengalokasian seseorang terhadap dimensi probabilitas subjektif yang meliputi hubungan antara dirinya sendiri dan beberapa tindakan (Ajzen, 1991). Niat perilaku menunjukkan seberapa keras seseorang bersedia untuk mencoba dan seberapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Hunt dan Vitell (1986) menggambarkan niat sebagai kemungkinan dari beberapa alternatif yang dipilih. Dalam penelitian ini niat perilaku yang dimaksud adalah niat aparatur sipil negara untuk melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Niat *fraud* pengadaan barang dan jasa diukur dengan mengadopsi instrumen penelitian Carpenters dan Reimers (2005). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur niat *fraud* pengadaan barang dan jasa adalah bermaksud, mencoba, dan berupaya.

Kesesuaian kompensasi

Kesesuaian kompensasi adalah tingkat kesesuaian kompensasi yang diterima seorang pegawai baik

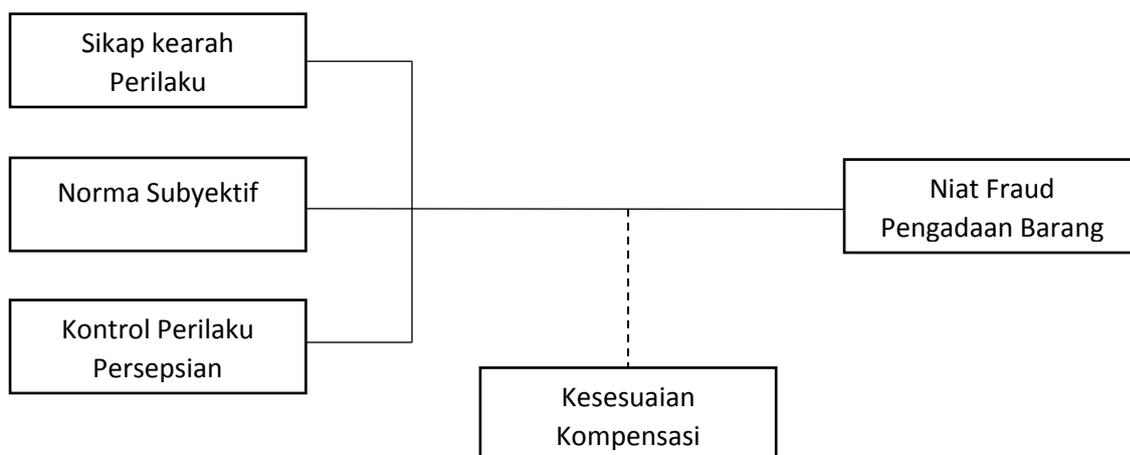
secara ekstrinsik dan intrinsik Gibson (1997:180). Kesesuaian kompensasi dalam penelitian ini adalah tingkat kesesuaian kompensasi yang telah diterima oleh aparatur sipil negara baik secara ekstrinsik dan intrinsik. Pengukuran kesesuaian kompensasi dalam penelitian dikembangkan dari pendapat Gibson (1997) tentang kompensasi dalam bentuk ekstrinsik dan intrinsik. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesesuaian kompensasi adalah kompensasi keuangan, kompensasi interpersonal, promosi, penyelesaian tugas, pencapaian sasaran, dan perkembangan pribadi.

penelitian dapat dilihat pada Gambar.1.

B. Kerangka Konsep dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini mengadopsi teori perilaku terencana Ajzen (1991) untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan menambahkan kesesuaian kompensasi sebagai variabel moderasi. Penambahan variabel moderasi kesesuaian kompensasi berdasarkan pendapat dari Ajzen (1991) dan model interaksionis Trevino (1986). Adapun kerangka konsep

Gambar.1
Kerangka Konsep Penelitian



Berdasarkan Gambar.1, kerangka konsep penelitian yang

telah dikembangkan dibangun dari teori dan beberapa penelitian

terdahulu. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1: Kesesuaian kompensasi memoderasi pengaruh sikap kearah perilaku terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa

H2: Kesesuaian kompensasi memoderasi pengaruh norma subyektif terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa

H3: Kesesuaian kompensasi memoderasi pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa

C. Hasil Penelitian

Respon Rate

Penelitian ini menggunakan data primer dengan kuisisioner sebagai instrumennya. Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Persentase pengembalian kuisisioner dapat dilihat pada Tabel.1.

Tabel.1
Persentase Pengembalian Kuisisioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuisisioner yang disebar	316	100%
Kuisisioner yang kembali	226	71,51%
Kuisisioner yang tidak terisi lengkap	0	0%
Kuisisioner yang dapat diolah	226	71,51%

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel.1, dalam proses pengumpulan data penelitian ini, sebanyak 316 kuisisioner yang disebarkan. Namun dari 316 kuisisioner yang disebar sebanyak 90 kuisisioner yang tidak kembali, sehingga kuisisioner yang dapat diolah berjumlah sebanyak 226.

Hasil Uji Model Penelitian

Model penelitian yang telah dibangun sebelumnya terlebih dahulu dilihat kesesuaian model. Model penelitian yang baik dapat menggambarkan kesesuaian hubungan antara variabel dalam penelitian. Uji model penelitian

dilihat dari tiga indikator fit dari data penelitian yaitu *Average Path Coefficient* (APC), *Average R-square* (ARS), dan *Average Variance Inflation Factor* (AVIF). APC dan ARS diperlukan karena keduanya dihitung sebagai rata-rata parameter model (Sholihin dan Ratmono, 2013:61). Ketentuan evaluasi model fit tersebut adalah

nilai *p-value* pada APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05 yang artinya signifikan. Selain itu, dalam *general result* perlu juga melihat nilai AVIF sebagai indikator multikolinearitas. Ketentuan untuk nilai AVIF adalah harus lebih kecil dari 5 (Sholihin dan Ratmono, 2013:61). Hasil uji model penelitian dapat dilihat pada Tabel.2.

Tabel.2
Output General Result

Keterangan	Nilai	P-value
<i>Average path coefficient</i> (APC)	0.211	P<0.001
<i>Average R-square</i> (ARS)	0.701	P<0.001
<i>Average Variance Inflation Factor</i> (AVIF)	2,556, diterima<5	

Sumber : data diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel.2, menunjukkan nilai APC dan ARS sebesar 0.211 dan 0.701 serta nilai *p-value* dari keduanya <0,001 atau signifikan. Artinya, evaluasi model fit berdasarkan APC dan ARS telah terpenuhi. Selanjutnya, untuk nilai AVIF adalah 2.556. Hal ini juga mengartikan bahwa evaluasi nilai AVIF telah memenuhi kriteria yang sesuai ketentuannya adalah kurang dari 5.

Evaluasi Outer model

Evaluasi *Outer model* bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap validitas dan reliabilitas model penelitian (Hartono dan

Abdillah, 2015). Sebelum melihat hubungan antar konstruk, terlebih dahulu harus memastikan bahwa indikator dari masing-masing konstruk adalah valid dan reliabel. Beberapa pengujian yang dinilai dalam *outer model* adalah validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas.

1. Validitas Konvergen

Parameter yang digunakan dalam uji validitas konvergen yaitu nilai *loading* lebih dari 0,7 dan *Average Variance Extracted* (AVE) lebih besar dari 0,05 (Hartono dan Abdillah, 2015). Hasil pengujian

validitas konvergen dapat dilihat pada Tabel.3.

Tabel.3
Output Combined Loadings and Cross-Loadings

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	AVE	<i>P-values</i>	Ket
Niat Fraud PBJ (NP)	NP1	0.919	0,851	<0,001	Valid
	NP2	0.919		<0,001	Valid
	NP3	0.929		<0,001	Valid
Sikap kearah Perilaku (SP)	SP1	0.895	0,754	<0,001	Valid
	SP2	0.893		<0,001	Valid
	SP3	0.813		<0,001	Valid
Norma Subyektif (NS)	NS1	0.857	0,779	<0,001	Valid
	NS2	0.893		<0,001	Valid
	NS3	0.897		<0,001	Valid
Kontrol Perilaku Persepsian (KPP)	KPP1	0.916	0,874	<0,001	Valid
	KPP2	0.941		<0,001	Valid
	KPP3	0.947		<0,001	Valid
Kesesuaian Kompensasi (KK)	KK1	0.687	0,546	<0,001	Valid
	KK2	0.751		<0,001	Valid
	KK3	0.708		<0,001	Valid
	KK4	0.751		<0,001	Valid
	KK5	0.709		<0,001	Valid
	KK6	0.818		<0,001	Valid

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel.3, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai *outer loading* lebih dari 0,70. Hanya indikator KK1 yang memiliki nilai 0.687. Namun, untuk penelitian dalam tahap pengembangan indikator yang memiliki nilai *loading* 0.4-0.7 masih dapat diterima (Sholihin dan Ratmono, 2013). Selain itu, nilai AVE menunjukkan

nilai AVE lebih besar dari 0.5. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan atau indikator yang digunakan telah memenuhi uji validitas konvergen.

2. Validitas Diskriminan

Parameter yang digunakan dalam validitas diskriminan yaitu berdasarkan *cross-loading*

pengukuran dengan konstruk. Jika nilai *cross-loading* setiap indikator pada satu variabel bernilai lebih besar dibandingkan dengan *cross-loading* pada variabel laten lainnya, maka konstruk dapat dinyatakan valid (Hartono dan Abdillah, 2015).

Cross-loading adalah nilai loading masing-masing indikator dari konstruk yang dibangunnya ke konstruk lain. Hasil pengujian validitas diskriminan dapat dilihat pada Tabel.4.

Tabel.4
Output Combined Loadings and Cross-Loadings

Indikator	NP	SP	NS	KPP	KK
NP1	0.919	-0.055	-0.068	0.067	-0.067
NP2	0.919	0.009	0.118	-0.140	0.077
NP3	0.929	0.046	-0.050	0.073	-0.009
SP1	0.074	0.895	-0.203	-0.013	-0.054
SP2	-0.143	0.893	0.048	-0.042	0.062
SP3	0.076	0.813	0.171	0.061	-0.009
NS1	-0.040	-0.009	0.857	-0.077	0.084
NS2	0.156	-0.128	0.893	0.081	0.003
NS3	-0.117	0.136	0.897	-0.006	-0.084
KPP1	-0.078	-0.092	0.171	0.916	-0.048
KPP2	0.110	0.075	-0.158	0.941	0.051
KPP3	-0.034	0.014	-0.008	0.947	-0.004
KK1	0.197	0.017	-0.006	-0.0330	0.687
KK2	0.088	-0.306	0.236	-0.016	0.751
KK3	0.043	0.182	-0.327	0.125	0.708
KK4	0.016	0.110	0.143	-0.317	0.751
KK5	-0.255	-0.032	0.182	0.083	0.709
KK6	-0.077	0.036	-0.219	0.152	0.818

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel.4, menunjukkan nilai *loading* masing-masing indikator dari konstruk yang dibangunnya ke konstruk lain atau disebut dengan *cross-loadings*

menunjukkan nilai lebih besar dari konstruk lainnya.

Selain melihat nilai *cross-loadings*, validitas diskriminan juga dilihat dari perbandingan nilai akar AVE

konstruk dengan nilai korelasi antar variabel laten (Hartono dan Abdillah, 2015). Hasil pengujiannya

dapat dilihat pada tabel *output correlations among latent variables* berikut :

Tabel.5
Output Akar Kuadrat Average Variance Extracted (AVE)

	NP	SP	NS	KPP	KK
NP	0.923	0.668	0.712	0.687	-0.209
SP	0.668	0.868	0.657	0.635	-0.147
NS	0.712	0.657	0.883	0.711	-0.160
KPP	0.687	0.635	0.711	0.935	-0.210
KK	-0.209	-0.147	-0.160	-0.210	0.739

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel.5, menunjukkan nilai akar AVE lebih besar dari korelasi dengan konstruk lainnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa data atau indikator yang digunakan untuk masing-masing konstruk telah memenuhi kriteria pengujian validitas diskriminan.

3. Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan nilai

Cronbach Alpha dan *Composite Reliability*. Kelompok indikator yang digunakan dalam satu konstruk variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 dan nilai *Composite Reliability* lebih besar dari 0,6 (Hartono dan Abdillah, 2015). Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.6.
Output Laten Variable Coefficient

Variabel	Composite reliab.	Cronbach's alpha	Keterangan
NP	0.945	0.913	Reliabel
SP	0.902	0.836	Reliabel
NS	0.914	0.858	Reliabel
KPP	0.954	0.928	Reliabel
KK	0.878	0.832	Reliabel

Sumber : data diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel.6, menunjukkan bahwa seluruh item indikator

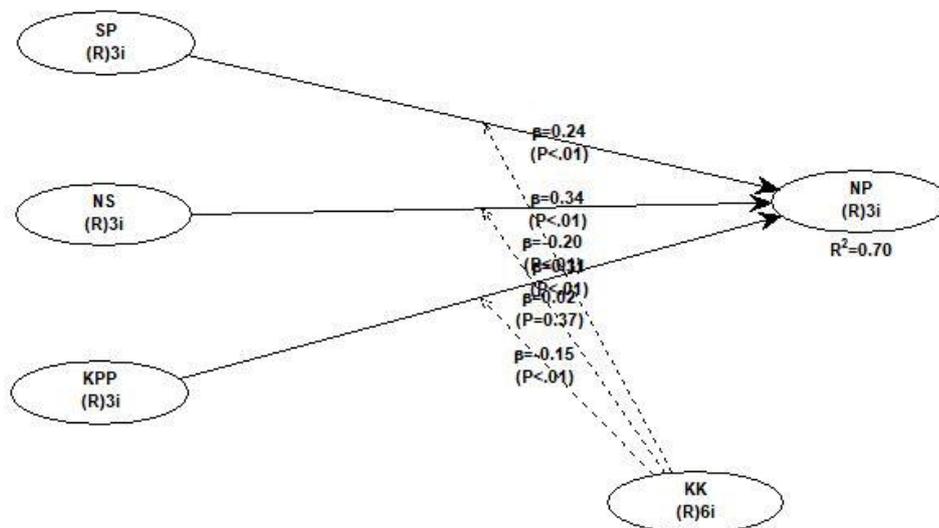
pernyataan pada setiap variabel penelitian mempunyai nilai

composite reliability dan *cronbach's alpha* lebih besar dari 0.6. hal ini mengartikan bahwa setiap indikator yang digunakan dalam instrumen penelitian ini telah memnuhi kireteria pengujian reliabilitas.

Evaluasi Inner Model

Evaluasi Inner model bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel yang telah dihipotesiskan. Model pengujian *inner* model yang dihasilkan disajikan pada Gambar.2

Gambar.2.
Model Pengujian



Berdasarkan Gambar.1, menunjukkan nilai R^2 variabel niat *fraud* pengadaan barang dan jasa sebesar 0.70. Hal ini dapat diinterpretasikan varian perubahan niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa sebesar 70% dapat dijelaskan oleh sikap kearah

perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku persepsian, dan kesesuaian kompensasi. sementara sisanya sebesar 30% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Hasil pengujian hipotesis secara ringkas disajikan pada Tabel.7. hipotesis diterima jika nilai

p-value lebih kecil dari 0,05, dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%.

Tabel.7.
Output path coefficient dan p-value

Hipotesis	Path coefficient	P-values	Keterangan
Hipotesis 1	-0.202	<0.001	Diterima
Hipotesis 2	0.022	0.368	Ditolak

Hipotesis 3	-0.154	<0.001	Diterima
--------------------	--------	--------	----------

Sumber : data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel.7, Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian kompensasi signifikan memoderasi pengaruh sikap kearah perilaku dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hal ini didukung dengan parameter untuk pengujian interaksi kesesuaian kompensasi dan sikap kearah perilaku menunjukkan nilai *p-value* <0,001 jauh dibawah taraf signifikansi 0,05. Hasil uji hipotesis interaksi kesesuaian kompensasi dan kontrol perilaku persepsian juga menunjukkan nilai *p-value* <0,001 jauh dibawah taraf signifikansi 0,05. Namun demikian, kesesuaian kompensasi tidak signifikan memoderasi pengaruh norma subyektif terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa ditunjukkan dengan nilai *p-value* 0.368 lebih besar dari 0,05.

Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi signifikan memoderasi pengaruh sikap kearah perilaku dan kontrol perilaku persepsian terhadap

niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa, hasil penelitian ini mendukung pendapat Ajzen (1991) dan Trevino (1986). Ajzen (1991) berpendapat bahwa ada faktor dari luar yang secara tidak langsung yang akan mempengaruhi sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat perilaku. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Trevino (1986) dalam model pengembangan interaksionis yang menjelaskan bahwa dalam situasi praktis perilaku etis atau tidak etis tidak hanya hasil dari karakteristik individual saja, namun perpaduan dari hasil individual dan situasional.

Agustina (2014) menjelaskan kesesuaian kompensasi adalah faktor situasional yang akan mempengaruhi seseorang dalam berperilaku etis atau tidak etis. Kesesuaian kompensasi ditentukan oleh apakah kompensasi yang diberikan suatu organisasi (baik dalam bentuk ekstrinsik dan intrinsik) sesuai ataupun layak dengan hasil dari pekerjaanya (Gibson, 1997).

Kesesuaian kompensasi digunakan sebagai pengendali hubungan sikap kearah perilaku dan kontrol perilaku persepsian terkait *fraud* pengadaan barang dan jasa terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Kesesuaian kompensasi akan menentukan perilaku karyawan maupun pegawai dalam suatu organisasi untuk berperilaku etis (Thoyyibatun, 2009).

Kompensasi yang sesuai akan memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi (Gibson, 1997). Motivasi untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi membuat aparatur sipil negara selalu ingin terlibat dalam hal positif. Tindakan *fraud* pengadaan barang dan jasa yang dinilai sebagai hal yang negatif karena sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa akan cenderung dihindari oleh aparatur sipil negara. Oleh sebab itu, kesesuaian kompensasi berdampak pada sikap aparatur sipil negara yang cenderung tidak mendukung terkait *fraud* pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, aparatur sipil negara juga cenderung tidak memiliki niat

melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Kesesuaian kompensasi juga memiliki pengaruh terhadap kontrol perilaku persepsian yang rendah oleh aparatur sipil negara. Akibatnya aparatur sipil negara cenderung tidak memiliki niat melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Khadarisman (2012) menjelaskan kompensasi yang sesuai memotivasi karyawan supaya bekerja lebih giat, disiplin dan mengembangkan kompetensinya. Motivasi untuk bekerja lebih disiplin tersebut membuat aparatur sipil negara melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana mestinya dengan aturan yang telah ditetapkan. Aparatur sipil negara yang disiplin dalam proses pengadaan barang dan jasa cenderung tidak pernah terlibat dalam tindakan *fraud* pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak memiliki persepsi berkenaan dengan perasaan mudah atau sulit melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Kesesuaian kompensasi nampaknya belum dapat mempengaruhi hubungan norma subyektif terhadap niat aparatur sipil

negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Kesesuaian kompensasi yang didesain agar aparatur sipil negara cenderung memiliki perilaku etis belum dapat mempengaruhi keyakinan normatif yang dimiliki seseorang serta motivasi untuk melaksanakan suatu perilaku yang diperoleh dari pihak disekitarnya yang akan mempengaruhi niatnya untuk melakukan suatu perilaku. Hal ini diduga disebabkan oleh keyakinan normatif yang didapatkan dari pimpinan, rekan kerja, dan bawahan cenderung tidak mendukung perilaku *fraud* pengadaan barang dan jasa, sehingga aparatur sipil negara tidak memiliki niat melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, aparatur sipil negara cenderung tidak mempertimbangkan kompensasi yang diterimanya telah sesuai maupun tidak.

III. SIMPULAN

Melalui penelitian ini dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa, niat aparatur sipil negara tidak hanya dipengaruhi oleh hasil dari karakteristik individual saja sebagaimana dalam teori perilaku

terencana. Namun, adanya interkasi antara karakteristik individual dan faktor situasional sebagai pertimbangan bagi aparatur sipil negara yang akan mempengaruhi niatnya melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Ajzen (1991) yang menjelaskan hubungan sikap kearah perilaku dan kontrol perilaku persepsian dalam mempengaruhi niat perilaku terdapat faktor dari luar yang akan mempengaruhi secara tidak langsung dan model interaksionis Trevino (1986) yang menjelaskan bahwa adanya perpaduan dari karakteristik individual serta faktor situasional dalam situasi praktis perilaku etis atau tidak etis.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian kompensasi memoderasi pengaruh sikap kearah perilaku dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Kesesuaian kompensasi bertujuan memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi (Gibsons, 1997:179). Selain itu, kompensasi yang sesuai akan

membuat karyawan menjadi disiplin (Khadarisman, 2012:1-3). Kesesuaian kompensasi yang memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi dan disiplin membuat aparatur sipil negara memiliki sikap yang tidak mendukung dan tidak memiliki kontrol perilaku persepsian terkait *fraud* pengadaan barang dan jasa. Akibatnya aparatur sipil negara tidak memiliki niat melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Akan tetapi, hasil penelitian ini menemukan bahwa kesesuaian kompensasi tidak menjadi variabel moderasi dalam pengaruh yang terjadi pada norma subyektif terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hal ini diduga disebabkan oleh temuan empiris yang menunjukkan bahwa keyakinan normatif yang didapatkan dari pimpinan, rekan kerja, dan bawahan cenderung tidak mendukung perilaku *fraud* pengadaan barang dan jasa, kompensasi yang sesuai maupun tidak belum dapat mempengaruhi tekanan yang didapatkan oleh pimpinan, rekan kerja, dan bawahan yang tidak mendukung melakukan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Saran untuk penelitian selanjutnya hendaknya mengeksplorasi variabel eksternal lainnya selain faktor situasional yaitu variabel demografi, karakteristik personalitas, kepercayaan dan sikap mengenai obyek-obyek dan karakteristik tugas yang diduga memoderasi hubungan sikap kearah perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku persepsian terhadap niat aparatur sipil negara dalam *fraud* pengadaan barang dan jasa. Selain itu, penelitian selanjutnya hendaknya mengeksplorasi pada jenis pekerjaan yang berbeda dan pada demografi yang berbeda agar dapat melakukan perbandingan perilaku menjadi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N, D. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Apratur Pemerintah atas Prosedur Pengadaan Brang dan Jasa. *Tesis*. Universitas Brawijaya
- Ajzen, I. (1991). *The Theory Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decicion Processes*. 50, hal.179-211.
- Ajzen, I. (2002) "Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the Theory of Planned

- Behavior". *Journal of Applied Social Psychology*, 32(4), hal.665-683.
- Bologna, G. Jack. Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells. (1993). *Investigation Audit*, Fourth Edition. Prentice-Hall & New Jersey
- Carpenter, Tina. D. dan Jane, L, Reimers. (2005). "Unethical and Fraudulent Financial Reporting: Aplying the Theory of Planned Behaviour". *Journal of Business Ethics*, Springer 2005, 60, hal.115-129.
- Chang, Man Kit. (1998). "Predicting Unethical Behavior: A Comparison of The Theory of Planned Behavior". *Journal of Business Ethics*. Dec 1988, 17, 16, ABI/INFORM Global, hal. 18-25
- Detik. (2018). *ICW: Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkat, Negara Rugi RP 1 T* (Retrifed from <https://news.detik.com/berita/d-3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat-negara-rugi-rp-1-t/25-2-2018>)
- Fisbein, M dan Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*.129-385. Addison-Wesley. Reading. MA.
- Gibson, J. L., J. M. Ivancavich, dan J. H. Donnelly. Jr., (1997). *Organizations: Behavior, Structure, Processess*. Chicago: Irwin.
- Hartono. J dan Abdillah, W. (2015). *Partial Least Square (PLS) : Alternatif Structural Equation Modeling(SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Andi.
- Harziani, P. (2015). "Sisi Lain Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Sebuah Studi Drama Turgi". *Tesis*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Hunt, S. D. dan S.J. Vitell. (1986). "A General Theory of Marketing Ethics". *Journal of Macromarketing*, 48, hal. 30-42.
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Edisi I. Andi Offset. Yogyakarta.
- Lin, Chua-Hua S dan Chen, Chun-Fei. (2011). "Aplication of Theory of Planned Behaviour on the Study of Workplace Dishonesty". *2010 International Conference on Economics, Business and Management. IPEDR vol.2 (2011)* © (2011) IAC S IT Press, Manila, Philippines
- Listyanto, A. (2012). "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Jurnal RechtsVinding*, Vol.1, No.1 hal.114

- Luthans, F. (1998). *Organisasi Behavior*, Eighth Edition, McGraw-Hill Intemasional Book Company, New York.
- Pavlou, P.A. & Fygenson, M. (2006). "Understanding and predicting electronic commerce adoption: an extension of the theory of planned behavior", *MIS Quarterly*, Vol. 30 No. 1. March, hal. 115-143.
- Republika. (2018). *KPK: Bupati HST Terima Fee Rp 3,6 Miliar* (Retrified from <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/05/p22yza409-kpk-bupati-hst-terima-fee-rp-36-miliar/5-1-2018>)
- Respati, N, W. (2011). "Determinan Perilaku Manajer dalam Melakukan Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan". *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Aceh.
- Robbins, S.P dan Mary, C. (2007). *Manajemen*. Edisi Kedelapan. Jilid Dua. PT. Indeks. Jakarta.
- Sholihin, M, dan Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*. Yogyakarta : Andi
- Sopian, A. (2012). *Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. LKPP & Jakarta
- Tempo.(2017). *Tata Kelola Pemerintah Kalimantan Selatan, KPK: Masih Serampangan* (Retrified from <https://nasional.tempo.co/read/876375/tata-kelola-pemerintah-kalimantan-selatan-kpk-masih-serampangan/17-11-2017>).
- Thoyyibatun, S. (2009). "Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi serta Akibatnya terhadap Kinerja Organisasi". *Jurnal : Universitas Negeri Malang*.
- Trevino, L, K. (1986). Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model. *Academy of Management Review*, 11, hal. 601-617.
- Victor, B. Dan J.B. Cullen. (1988). "The Organizational Bases of Ethical Work Climate". *Administrative Science Quarterly*, hal. 33